

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

Oleh :

Nisma Okidah - 14010111110098

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Kajian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Batang Kabupaten Batang merupakan pembahasan yang cukup menarik seiring dengan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki permasalahan utama yaitu kemiskinan dan pengangguran terutama di perdesaan. Oleh karena itu Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 pada tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) untuk mengatasi keterbatasan sumber permodalan bagi petani. Dalam rangka pelaksanaan PUAP Menteri Pertanian telah membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. Kabupaten Batang merupakan penerima bantuan dana. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan juga oleh Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong. Kegiatan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) berbentuk simpan pinjam. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong?” dan “Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong?”.

Tipe penelitian ini adalah kualitatif tipe deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan sumber data sekunder diperoleh dari arsip, buku, jurnal dan sumber lain. Teknik analisis dengan penganalisaan dari berbagai sumber, reduksi data, sampai penarikan kesimpulan sesuai hasil yang diperoleh dari lapangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: pertama, Kebijakan PUAP dilaksanakan oleh 162 desa dan kelurahan di Kabupaten Batang. Dalam lokasi penelitian yaitu Desa Denasri Wetan dikategorikan sangat baik dalam pelaksanaan kebijakan namun kedua kelurahan pembandingnya yaitu Kelurahan Kasepuhan dan Kelurahan Sambong masih dalam tahap perkembangan dan masih menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Kedua, faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan Kebijakan PUAP berasal dari Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan masyarakat penggunanya sendiri.

Saran yang dapat diberikan penulis untuk instansi terkait yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah untuk terus meningkatkan, mempertahankan kinerja dan kerjasamanya antar aktor dalam monitoring dan evaluasi Gapoktan penyelenggara Kebijakan PUAP serta bersama-sama memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang muncul di lapangan. Sedangkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah penulis dapat menganalisis tingkat ketergantungan masyarakat pengguna Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP terhadap adanya dana PUAP dari pemerintah.

Kata Kunci: Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Gapoktan.

ABSTRACTION

Study on Evaluation of Rural Agribusiness Development Policy (PUAP) in the District of Batang, Batang county is a fairly interesting discussion in line with the policies of poverty alleviation in rural areas.

Developing countries such as Indonesia have major problems, namely poverty and unemployment, especially in rural areas. Therefore, the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia issued Regulation of the Minister of Agriculture No. 16 / Permentan / OT.140 / 2/2008 on February 11, 2008 on general guidelines for Rural Agribusiness Development (PUAP) to overcome the limitation of capital sources for farmers. In the framework of the implementation of PUAP Minister of Agriculture has established a Rural Agribusiness Development Team of the Minister of Agriculture No. 545 / Kpts / OT.160 / 9/2007. Batang district is the recipient of funds. In the implementation of the Rural Agribusiness Development Policy (PUAP) also implemented by the Denasri Wetan sub district, Kasepuhan sub district, and Sambong sub district. The activities of the Rural Agribusiness Development Policy (PUAP) are savings and loans. Therefore, the formulation of the problem in this research is "How do the Implementation of Rural Agribusiness Development Policy (PUAP) Denasri Wetan sub district, Kasepuhan sub district, and Sambong sub district?" And "What are the factor that support and obstacle in the implementation of developing an Agribusiness rural areas (PUAP) policy in Denasri Wetan sub district, Kasepuhan sub district, and Sambong sub district? ".

This type of research is a qualitative descriptive type. The primary data source was obtained through interviews, observation, and documentation and secondary data sources obtained from the archives, books, journals and other

sources. Mechanical analysis with analysis from various sources, data reduction, until the conclusion according to the results obtained from the field.

From the results of research conducted by the author, the conclusion that can be drawn from this study are: first, PUAP policy implemented by the 162 villages and sub-districts in Batang. In the study sites, Denasri Wetan sub district is categorized very good in the implementation of policies, but both of the comparative sub-districts such as Kasepuhan sub district and Sambong sub district are still developing and encountering some obstacles in its implementation. Second, supporting factors and obstacles of implementing the Policy Board PUAP derived from Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) and the user community themselves.

Advice that can be given by author to relevant agencies namely the Executive Agency and the Food Security Extension (BP2KP) and Supervisor Mitra Tani (PMT) are continuing to improve, maintain performance and cooperation between actors in the monitoring and evaluating of policies PUAP Gapoktan organizers and together provide the best solutions to the problems that arise in the field. Whereas, recommendation for further research is the author can analyze the user community dependence Direct Community Assistance (BLM) PUAP toward PUAP funds from the government.

Keywords: Developing a Policy Rural Agribusiness (PUAP), Gapoktans

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah utama dalam sebuah negara berkembang termasuk Indonesia. Pada Bulan Maret tahun 2007 tercatat penduduk miskin 37,17 juta jiwa (BPS). 63,52% penduduk miskin berada di pedesaan dan hampir separuhnya bekerja pada sektor pertanian¹. Melihat fenomena tersebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 pada tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui bantuan modal terutama di sektor pertanian. Selain itu dalam rangka pelaksanaan PUAP Menteri Pertanian telah membentuk Tim

¹ <http://www.bps.go.id> Diunduh Hari Senin, 7 Oktober 2013, Pukul 19.45 WIB

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dengan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007². Sasaran dari kebijakan tersebut adalah keseluruhan desa atau kelurahan di Negara Indonesia dengan kategori desa miskin dan tertinggal serta menyesuaikan potensi desa atau kelurahan masing-masing.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang sendiri sebanyak 77.411 jiwa atau sekitar 11,05 persen dan jumlah desa tertinggal sejumlah 123 desa atau 49,59 persen³. Oleh karena itu tercatat sampai dengan Tahun 2014 sejumlah 162 desa atau kelurahan mendapatkan bantuan dana PUAP. Pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp.100.000.000,00 untuk setiap desa atau kelurahan yang mana dana tersebut dilimpahkan, diserahkan, dan harus di pertanggungjawabkan oleh Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam hal ini adalah Ketua Gapoktan. Gapoktan adalah lembaga desa pelaksana PUAP yang bertugas untuk menyalurkan modal tersebut kepada anggotanya yang membutuhkan.

Kabupaten Batang terbagi menjadi beberapa kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Batang yang terbagi lagi kedalam 21 desa dan kelurahan. Dalam penelitian ini penulis mengambil 3 desa dan kelurahan, yaitu Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong. Alasan penulis mengambil desa dan kelurahan tersebut antara lain: Pertama, penulis melihat luas lahan yang cukup luas pada ketiganya. Kedua, penulis ingin menilai dan membandingkan bagaimana pelaksanaan Kebijakan PUAP di Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong karena ketiganya

² <http://repository.usu.ac.id> Diunduh Hari Selasa, 2 September 2014, Pukul 19.00 WIB

³ <http://batangkab.go.id/> Diunduh Hari Selasa, 19 November 2013, Pukul 19.01 WIB

melaksanakan PUAP pada tahun yang berbeda. Jika nantinya terdapat salah satu diantaranya adalah pelaksana Kebijakan PUAP dengan kategori baik maka diharapkan desa atau kelurahan tersebut menjadi contoh dan pembelajaran bagi desa atau kelurahan lain yang masih atau belum melaksanakan PUAP dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kecamatan Batang Kabupaten Batang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) terutama di Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong yang menjadi lokasi penelitian. Bagaimana pelaksanaan kebijakan di ketiga wilayah tersebut apakah telah sesuai sasaran dan tujuan kebijakan secara umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori evaluasi kebijakan. Berdasarkan teori tersebut penulis mencoba mengidentifikasi dari sisi efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketetapan, dan identifikasi lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Tabel 1.1
Indikator Evaluasi Kebijakan⁴

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada masyarakat yang berbeda?

⁴ Drs, AG. Subarsono, M.Si, MA. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Jogjakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 126

4	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi / nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketetapan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan menganalisis dokumen dan arsip-arsip seperti Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Penulis kemudian melakukan tahap selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data, alurnya dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Menurut lampiran peraturan Menteri Pertanian nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 1 Februari 2012 mengenai Pedoman Umum Pengembangan usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) :

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa (14,15%). Dari jumlah tersebut sekitar 20,65 juta jiwa berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Pada umumnya petani di perdesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Pada bulan Maret 2010, BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun menjadi 31,02 juta jiwa (13,33%), dan pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin turun menjadi 30,01 juta jiwa (12,46%). Pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1,01 juta jiwa (0,87%).

Jadi kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan dalam memecahkan permasalahan dalam bidang pertanian dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat petani untuk menghadapi permasalahan mengenai kurangnya sumber permodalan dalam mengelola lahan.

Latar Belakang adanya kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tersebut disampaikan oleh Bapak Ir. Agus Sembodo selaku Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) pada tanggal 18 Maret 2015, bahwa:

“...kebijakan PUAP merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang diluncurkan tahun 2008. Pemerintah melihat petani selalu kekurangan modal untuk menggarap lahanya. Kebijakan PUAP digulirkan kepada gapoktan yang mempunyai unit-unit usaha. Sebagian besar masyarakat kecil itu kurang modal dalam pengembangan usahanya sehingga diadopsi oleh pemerintah untuk diberi tambahan modal untuk kegiatan agribisnis...”⁵

2. Gambaran Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Batang

Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) diturunkan oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2008. Kabupaten Batang menerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP pada tahun 2008 namun pelaksanaan di setiap desa atau kelurahan tidak secara langsung di tahun tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak semua Gapoktan suatu desa atau kelurahan sudah siap untuk menggulirkan dana hibah tersebut.

⁵ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Ir. Agus Sembodo, Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Batang Pada Tanggal 18 Maret 2015.

Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Batang Bapak Ir. Agus Sembodo pada tanggal 18 Maret 2015, bahwa:

“...kebijakan PUAP dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia pertama kali tahun 2008. Kebijakan ini ditujukan untuk semua wilayah Indonesia secara menyeluruh. Kabupaten Batang sendiri sampai terakhir sudah digulirkan sebanyak 162 desa atau kelurahan...”⁶

3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

A. Kejelasan Arah dan Tujuan

Menurut lampiran peraturan Menteri Pertanian nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 1 Februari 2012. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan bentuk kebijakan di sektor pertanian yang bertujuan untuk:

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis;
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Tujuan adanya kebijakan PUAP tersebut disampaikan oleh Bapak Ir. Agus Sembodo selaku Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Badan Pelaksana

⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Agus Sembodo, Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Pada Tanggal 18 Maret 2015.

Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Batang pada tanggal 18 Maret 2015, bahwa:

“...manfaat dan tujuan dikeluarkannya Kebijakan PUAP pasti dirasakan oleh masyarakat penggunaannya dengan catatan apabila dana PUAP digulirkan dengan baik sesuai arah dan sasarannya. Karena tujuan PUAP adalah membantu masyarakat dalam hal permodalan...”⁷

B. Deskripsi dan ruang lingkup kegiatan PUAP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tercantum pada bab II Point 2.4 ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi desa calon lokasi serta Gapoktan penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP 2012.
2. Identifikasi, verifikasi dan penetapan Desa dan Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2012;
3. Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping dan pengurus Gapoktan;
4. Rekrutmen dan pelatihan bagi Penyelia Mitra Tani (PMT);
5. Sosialisasi dan koordinasi kegiatan PUAP;
6. Pendampingan;
7. Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat;
8. Pembinaan dan Pengendalian;
9. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

C. Efektivitas Kebijakan

Tingkat efektivitas dapat dinilai dari tingkat produktivitas ndan tingkat kepuasan anggota. Tingkat produktivitas meliputi kesesuaian program dengan

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Agus Sembodo, Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Batang Pada Tanggal 18 Maret 2015.

pelaksanaan dan dampak dari dana bergulir terhadap asset dan omset⁸. Pelaksanaan Kebijakan PUAP terlihat sangat efektif di Desa Denasri Wetan sehingga terpilih sebagai “Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi” se-kabupaten dan di ikutsertakan lomba di tingkat provinsi sedangkan Kelurahan Kasepuhan dan Kelurahan Sambong terus berkembang dan masih menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terlihat dari laporan perkembangan unit usaha keuangan mikro setiap bulanya.

Tabel 1.2
Laporan Perkembangan Unit Usaha Keuangan Mikro/LKM Per Maret 2015 Gapoktan Tani Bahagia Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang

AKTIVA		
	Kekayaan (Aktiva Lancar)	Jumlah (Rp)
1.01	Kas	828.846
1.02	Dana UPG di Bank	101.202.256
1.03.1	Pembiayaan Usaha	304.643.500
1.03.2	Piutang Lain	
1.103.4	Penghapus pembiayaan	
	Sub Total	406.674.602
1.04	Persediaan Barang	
	Aktiva Tetap	
1.05.2	Inventaris Kantor	25.135.000
1.05.2	Akumulasi Penyusutan	(16.217.300)
	Aktiva Lain-lain	
1.06.1	Biaya di Muka	2.000.000
1.06.2	Perlengkapan Kantor	
	Sub Total	10.855.200
	Total	417.592.302

⁸http://smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2026/Efektifitas_prog_Dana_Bergulir.pdf
Diunduh Selasa 19 Mei 2015 Pukul 13.26 WIB

PASIVA		
	Simpanan	Jumlah (Rp)
2.01.01	Tabungan Anggota	63.418.556
2.01.01	Tabungan Hari Raya	1.464.000
	Sub Total	64.882.556
2.02	Kewajiban Pihak ketiga	70.000.000
2.03	Dana Titipan	92.500.000
	Sub Total	162.500.000
	Modal	
3.01.01	Iuran Anggota	8.885.000
3.01.02	Iuran Bulanan	
3.01.03	Modal PUAP Deptan	100.000.000
3.01.04	Cadangan modal	53.743.985
3.01.05	Laba belum dibagi	15.461.521
3.02.02	Laba Ditahan	8.072.740
3.02.03	Laba bulan ini	4.046.500
	Sub Total	190.209.746
	Total	417.592.302

No	URAIAN	Jumlah (Rp)
a.	Pendapatan Usaha	
4.01.01	Jasa Pembiayaan	4.907.900
4.01.02	Pendapatan Administrasi	1.017.500
4.01.03	Pendapatan bagi Hasil Bank	
4.01.04	Pendapatan Usaha	
4.01.05	Pendapatan Lain-lain	
	Sub Total (a)	5.925.400
b.	Biaya	
5.01	Beban Karyawan dan pengurus	1.170.000
5.02	Beban Administrasi Kantor	459.900
5.03	Biaya Umum	249.000
5.04	Pemeliharaan dan Perbaikan	
5.05	Penyusutan Inventaris Kantor	
5.06	Amortisasi Biaya dimuka	
5.07	Biaya Non Operasional	
	Sub Total (b)	1.878.900
c.	Laba-Rugi (a-b)	4.046.500

Sumber: Laporan Administrasi Gapoktan Tani Bahagia Desa Denasri Wetan, Maret 2015.

Tabel 1.3
Daftar Pemenang Masing-Masing Kategori Lomba Penyuluhan Tingkat Kabupaten Batang Tahun 2015.

No.	Kategori	Nama Peserta	Alamat
I.	BIDANG PERTANIAN:		
	Penyuluh Pertanian PNS Teladan	Masiman, SP	BP3K Kec.Bandar
	Penyuluh Pertanian Swadaya	Nikma Ropik	Kec. Bawang
	THL-TBPP Teladan	Suwarno	BP3K Kec. Bawang
	Petani Teladan	Agus Riswanto, Amk	Desa Pesalakan, Kec. Bandar
	Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi	Tani Bahagia	Desa Denasri Wetan, Kec. Batang
	Gapoktan Berprestasi	Peni Murni	Desa Deles, Kec. Bawang
	Posluhdes Berprestasi	BP3K Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
	BPP Berprestasi	BP3K Kec. Banyuputih	Kec. Banyuputih
II.	BIDANG PERIKANAN:	Mina Berkah Sedoyo	Desa Rowobelang, Kec. Batang
	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)		
III.	BIDANG KEHUTANAN:	Saefudin, SP	BP3K Kec. Tersono
	Penyuluh Kehutanan Teladan		
	Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	Suprayitno	Desa Durenombo Kec. Subah
	Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM)	SDN Boja 02	Desa Boja, Kec. Tersono

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Batang, Tahun 2015.

Tabel 1.4
Laporan Perkembangan Unit Usaha Keuangan Mikro/LKM Per Maret 2015 Gapoktan Barokah I Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang

AKTIVA		
	Kekayaan (Aktiva Lancar)	Jumlah (Rp)
1.01	Kas	45.084.000

1.02	Dana UPG di Bank	41.779.253
1.03.1	Pembiayaan Usaha	
1.03.2	Piutang Lain	
1.103.4	Penghps pby	
	Sub Total	127.338.253
1.04	Persediaan Barang	
	Aktiva Tetap	
1.05.2	Inventaris Kantor	100.000
1.05.2	Akumulasi Penyusutan	
	Aktiva Lain-lain	
1.06.1	Biaya di Muka	600.000
1.06.2	Perlengkapan Kantor	
	Sub Total	700.000
	Total	128.038.253

PASIVA		
	Simpanan	Jumlah (Rp)
2.01.01	Tabungan Anggota	3.424.000
2.01.01	Tabungan Hari Raya	
	Sub Total	
2.02	Kewajiban Pihak ketiga	700.000
2.03	Dana Titipan	2.484.750
	Sub Total	
	Modal	
3.01.01	Iuran Anggota	2.479.000
3.01.02	Simpanan	3.491.000
3.01.03	Modal PUAP Deptan	100.000.000
3.01.04	Cadangan	
3.01.05	Cadangan resiko	
3.02.02	Laba Ditahan	15.687.503
3.02.03	Laba bulan ini	-224.000
	Sub Total	
	Total	128.038.253

No	URAIAN	
a.	Pendapatan Usaha	Jumlah (Rp)
4.01.01	Jasa Pembiayaan	76.000

4.01.02	Pendapatan Administrasi	
4.01.03	Pendapatan bagi Hasil Bank	
4.01.04	Pendapatan Usaha	
4.01.05	Pendapatan Lain-lain	
	Sub Total (a)	76.000
b.	Biaya	
5.01	Beban Karyawan dan pengurus	300.000
5.02	Beban Administrasi Kantor	
5.03	Biaya Umum	
5.04	Pemeliharaan dan Perbaikan	
5.05	Penyusutan Inventaris Kantor	
5.06	Amortisasi Biaya dimuka	
5.07	Biaya Non Operasional	
	Sub Total (b)	300.000
c.	Labarugi (a-b)	-224.000

Sumber: Laporan Administrasi Gapoktan Barokah I Kelurahan Kasepuhan, Maret 2015.

Tabel 1.5

Laporan Perkembangan Unit Usaha Keuangan Mikro/LKM Per Maret 2015 Gapoktan Lancar Jaya Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kabupaten Batang

AKTIVA		
	Kekayaan (Aktiva Lancar)	Jumlah (Rp)
1.01	Kas	29.854.200
1.02	Dana UPG di Bank	20.239.027
1.03.1	Pembiayaan Anggota	64.497.000
1.03.2	Piutang Lain	
1.103.4	Penghps pembiayaan	
	Sub Total	114.590.227
1.04	Persediaan Barang	
	Aktiva Tetap	
1.05.2	Inventaris Kantor	2.250.000
1.05.2	Akumulasi Penyusutan	(125.000)
	Aktiva Lain-lain	
1.06.1	Biaya di Muka	
1.06.2	Perlengkapan Kantor	
	Sub Total	2.125.000
	Total	
		116.715.227

PASIVA		
	Simpanan	Jumlah (Rp)
2.01.01	Tabungan Anggota	
2.01.01	Tabungan Hari Raya	
	Sub Total	
2.02	Kewajiban Pihak ketiga	
2.03	Dana Titipan	
	Sub Total	
	Modal	
3.01.01	Iuran Anggota	1.410.000
3.01.02	Iuran Bulanan	2.475.000
3.01.03	Modal Awal/Tambah Modal	
3.01.04	Modal PUAP dari Deptan	100.000.000
3.01.05	Cadangan Modal	
3.01.06	Cadangan resiko	
3.02.01	Laba Ditahan	1.348.978
3.02.02	Laba bulan ini	(79.584)
	Sub Total	
	Total	116.715.227

No	URAIAN	
a.	Pendapatan Usaha	Jumlah (Rp)
	Jasa Pembiayaan	565.000
	Pendapatan Administrasi	50.000
	Pendapatan bagi Hasil Bank	15.520
	Pendapatan Usaha	
	Pendapatan Lain-lain	
	Sub Total (a)	630.520
b.	Biaya	
	Beban Karyawan dan pengurus	
	Beban Administrasi Kantor	14.000
	Biaya Umum	
	Pemeliharaan dan Perbaikan	625.000
	Penyusutan Inventaris Kantor	62.500
	Amortisasi Biaya dimuka	
	Biaya Non Operasional	
	Pajak dan Administrasi Bank	8.604
	Sub Total (b)	710.104

c.	Labarugi (a-b)	(79.584)
-----------	-----------------------	----------

Sumber: Laporan Administrasi Gapoktan Lancar Jaya Kelurahan Sambong, Maret 2015.

Pengukuran tingkat efektivitas lainnya adalah berdasar tingkat kepuasan anggota. Berdasarkan penelitian di lapangan penulis menyimpulkan tingkat kepuasan pengguna BLM PUAP sangat tinggi. Siklus kehidupan petani yang terus menerus membutuhkan modal saat tanam dan mengembalikannya saat musim panen membuat masyarakat sangat bergantung dengan dana PUAP tersebut oleh karena itu masyarakat peminjam (petani dan bakulan) sangat puas dan merasakan banyak manfaatnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sunardi sebagai pengguna BLM PUAP Gapoktan Lancar Jaya Kelurahan Sambong, bahwa:

“...menurut saya ya manfaatnya ya banyak terutama kan seperti saya cuma seorang petani kalau mulai mengolah sawah perlu modal, dengan adanya gapoktan kan kita bisa pinjam dan lebih mudah daripada pinjam uang contohnya di bank kan berbelit-belit, bunganya besar...”⁹

D. Pemerataan

Sasaran Kebijakan PUAP adalah keseluruhan anggota Gapoktan terutama yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan akses permodalan. Pemerataan dalam penyaluran BLM PUAP di desa atau kelurahan daerah penelitian sudah dikategorikan cukup. Jumlah anggota pengguna BLM PUAP di Desa Denasri Wetan berjumlah 266 orang, sedangkan di Kelurahan Kasepuhan berjumlah 57 orang, dan di Kelurahan Sambong berjumlah 47 orang. Hal tersebut dikarenakan tidak semua petani dan pedagang kecil membutuhkan bantuan modal.

E. Kecukupan

⁹ Berdasarkan wawancara Bapak Sunardi, Pengguna BLM PUAP Gapoktan Lancar Jaya Kelurahan Sambong Pada tanggal 5 Maret 2015.

Kecukupan terkait dengan penganggaran dana dan manfaat untuk masyarakat pengguna BLM PUAP. Dalam Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp.100.000.000,00 per desa atau kelurahan.

Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ir. Agus Sembodo selaku Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) pada tanggal 18 Maret 2015, bahwa:

“...pengalokasian dana untuk setiap desa dari dulu hingga sekarang sebesar seratus juta dan belum ada penambahan dana lagi dari pusat...”

Akan tetapi berbeda dengan Desa Denasri Wetan yang selalu mengusulkan terkait dengan penambahan dana, hal tersebut dikarenakan jumlah pengguna BLM PUAP pada Gapoktan sangat banyak sehingga perlu adanya penambahan dana untuk digulirkan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Indah Yanuarti, Amd selaku Penyelia Mitra Tani (PMT) Kecamatan Batang pada tanggal 18 Maret 2015, bahwa:

“...nggak banyak usulan dari gapoktan mbak, ya yang sering ngusulkan itu Gapoktan Tani Bahagia Desa Denasri Wetan itu, selalu mengusulkan biar ditambah dana oleh pemerintah karena gapoktan di sana bagus mbak setiap bukaan kas hari jum'at itu pasti ramai, ada yang nabung ada yang pinjam, ada yang mengembalikan pinjaman...”

F. Responsivitas

Masyarakat banyak yang memberikan respon positif terhadap Kebijakan PUAP. Menurut mereka kebijakan semacam ini perlu dilanjutkan karena berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dalam memperoleh pinjaman syaratnya cukup mudah yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

“...sangat perlu dilanjutkan namun pihak terkait PUAP itu harus meningkatkan kesadaran masyarakat peminjamnya itu biar kalo pinjam ya dikembalikan...”¹⁰

G. Ketetapan

Ketetapan berkaitan dengan manfaat hasil yang dicapai. Masyarakat kecil banyak yang merasakan manfaat dari adanya dana PUAP ini. Beberapa informan menyadari bahwa dirinya dapat lebih memenuhi kebutuhan hidup dengan meminjam modal untuk mengolah lahan dan menambah modal usahanya.

“...saya disini kan pengurus sekaligus anggota peminjam mbak, saya akui dana ini sangat istimewa dan harus kita jaga dan hati-hati saat dipinjamkan. Jangan sampai ada kredit macet dan uangnya bubar begitu saja. Saya selalu bilang begitu mbak sama peminjam, kemarin pas RAT saya juga bicara demikian. Jadi tolong bapak atau ibu peminjam jangan sampai ada kredit macet. Soalnya ini dana dari pusat, apabila bapak/ibu main-main bisa berurusan sama yang berwajib. Sebenarnya PUAP itu dana hibah dari pemerintah mbak, dalam artian begini dana tersebut boleh dikembalikan atau bahkan nggak usah dikembalikan juga nggak apa-apa. Tapi kan saya tidak ngomong seperti itu kepada petani, nanti malah mereka nggampangke, ya kita rahasiakan...”¹¹

H. Faktor-Faktor Pengaruh Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan tidak semua kebijakan dari pemerintah akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Kebijakan yang dijalankan akan selalu mengandung faktor pendukung yang akan menjadi pendorong terealisasinya kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan publik. Sedangkan faktor penghambat yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan kebijakan yang menjadikan beberapa tujuan kebijakan tidak terealisasi juga biasa terjadi.

¹⁰ Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Muchidin, Pengguna BLM PUAP Gapoktan Barokah I Kelurahan Kasepuhan Pada Tanggal 18 Maret 2015.

¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Hartoyo, Sekretaris Gapoktan Lancar Jaya Kelurahan Sambong Pada Tanggal 5 Maret 2015.

“...faktor pendukung dan penghambat itu dari Gapoktan dan UPG serta masyarakat itu sendiri mbak. Kadang seperti ini PUAP tidak berhasil dalam pengimplementasiannya dikarenakan pola pikir masyarakat bawah yang ya seperti itu lah. Kalau tahu ada dana dari pemerintah semua pegenya pinjam. Mereka berpikir wong dana soko pemerintah kok, balike keno ora yo keno. Masyarakat itu seperti itu mbak...”¹²

“...kendala di Gapoktan Barokah I ini ya karena menghadapi masyarakat kuncinya satu mbak kita harus sabar. Yang namanya masyarakat diberi pinjaman kadang tidak tepat waktu dalam membayar. Kita sebagai pelayan masyarakat ya harus sabar-sabar menghadapinya. Kadang yo mbak, wayahe setoran mereka nggak datang, kadang malah ada yang molor-molor sampai satu tahun. Ya akeh jengkele mbak ngadepi masyarakat tapi yo piye maneh kudu sabar lah. Aku yakin mbak di desa atau kelurahan lain ya ada yang seperti ini, sing arani masyarakat krungu ono pinjaman kasarane hutang kabeh yo pengene podo hutang. Tapi yo kadang nyaure sing klendat-klendet...”¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2008 untuk seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Kabupaten Batang termasuk penerima bantuan dana dan hingga sekarang jumlah penerima BLM PUAP berjumlah 162 desa dan kelurahan termasuk Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong. Pelaksanaan Kebijakan PUAP di Desa Denasri Wetan dikatakan sangat baik sehingga terpilih menjadi kelembagaan ekonomi petani berprestasi terbaik se-kabupaten tahun 2015 dan terpilih

¹² Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indah Yanuarti Sulistianingsih, Amd, Penyelia Mitra Tani (PMT) Kecamatan Batang Pada Tanggal 18 Maret 2015.

¹³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suprayitno, Ketua Gapoktan Barokah I Kelurahan Kasepuhan Pada Tanggal 16 Maret 2015.

untuk di ikutsertakan lomba di tingkat provinsi. Namun pelaksanaan di Kelurahan Kasepuhan dan Kelurahan Sambong masih dalam tahap perkembangan dan masih menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan PUAP di Desa Denasri Wetan, Kelurahan Kasepuhan, dan Kelurahan Sambong berasal dari Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan masyarakat sendiri. Faktor pendukungnya antara lain: Adanya kesadaran Pengurus Gapoktan dan masyarakat mengenai manfaat dana PUAP yang sangat besar jika mereka bersama-sama menjaga dan mengembangkan dana dari pemerintah, mengingat di desa atau kelurahan tersebut belum ada lembaga keuangan sebagai sumber permodalan. Faktor penghambat antara lain: Kurangnya pengendalian oleh Pengurus Gapoktan dalam pengguliran dana kepada masyarakat, pola pikir masyarakat yang tergolong kurang serta rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam mengartikan dana bantuan dari pemerintah.
3. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi Kebijakan PUAP, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) melakukan kerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian, perikanan, dan Kehutanan (BP3K) masing-masing kecamatan. Instansi terkait melakukan evaluasi hanya sekali dalam satu tahun untuk per desa atau kelurahan. Hal tersebut mengingat jumlah Gapoktan penerima PUAP di Kabupaten Batang sebanyak 162. Namun untuk pendampingan dan penyuluhan selalu dilakukan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) Hal tersebut sudah sesuai

dikarenakan tugas Penyelia Mitra Tani (PMT) diantaranya adalah penghubung antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.bps.go.id> Diunduh hari Senin, 7 Oktober 2013, Pukul 19.45.
- <http://repository.usu.ac.id> Diunduh Hari Selasa, 2 September 2014, Pukul 19.00 WIB.
- <http://batangkab.go.id/> di unduh hari Selasa, 19 November 2013, Pukul 19.01.
- Robert Eyestone (dalam Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*), CAPS, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.
- Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta, PT. Buku Seru. Hlm 34.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Jogjakarta: Gava Media. Hal 17.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Aplikasi)*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 12-13.
- Abdul Kahar Badjuri dan Teguh Yuwono. 2002. Hlm 1386.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya. CV.Putra Media Nusantara. Hlm 169.
- Drs, AG. Subarsono, M.Si, MA. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Jogjakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 126
- Dr. Riant Nugroho, 2009, *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/EVALUASI-PELAKSANAAN-PROGRAM-PUAP.pdf> Diunduh hari Selasa, 3 Desember 2013, Pukul 06.30.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2008. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 1-2.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm 252.
- Moloeng, Lexsy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Lexy J. Moeloeng, M.A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Hlm. 247.
- www.suaramerdeka.com/harian/0510/04/nas20.htm, Suara Merdeka Selasa 04 Oktober 2005. Diunduh Rabu 06 Maret 2015 Pukul 12.23 WIB.
- www.suaramerdeka.com/harian/0410/05/pan05.htm Suara Merdeka Selasa 05 Oktober 2004. Diunduh Rabu 06 Maret 2015 Pukul 12.23 WIB.
- <http://regionalinvestment.bkpm.go.id> Diunduh Sabtu 03 Januari 2015 Pukul 17.05 WIB.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/2/2012.
- www.deptan.go.id Diunduh 12 Februari 2015 Pukul 09.45 WIB.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/ OT.140/1/2014. Diunduh pada 23 Maret 2015 Pukul 06.15 WIB.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2011. Diunduh pada 01 April 2015 Pukul 13.30 WIB
- Efektivitas Program Dana Bergulir Bagi Koperasi dan UKM oleh Dr. Ir. Riana Panggabean, MS Dalam http://smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2026/Efektifitas_prog_Dana_Bergulir.pdf Diunduh Selasa 19 Mei 2015 Pukul 13.26